



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

NOMOR : 147/KPTA.W6-A/PW1.1.2/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
15. Surat Kepala Bawas Mahkamah Agung RI Nomor : 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian ZI pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1708/DJA/M.01/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 Tentang Rekapitulasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sebagai Bahan Pembinaan;
17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2627/HM.00/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 Tentang Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendampingan, Monitoring, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026.
- KEDUA : Tugas Tim Pendampingan, Monitoring, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama antara lain:
1. melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi setiap area pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada satker yang diusulkan;
 2. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap satuan kerja (secara daring) baik yang diusulkan maupun yang belum diusulkan pada tahun 2022 dengan fokus pada area-area yang berdasarkan hasil penilaian pendahuluan yang lalu;
 3. Melaporkan kegiatan tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI melalui aplikasi kinsatker pada setiap akhir triwulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua,

ABDULLAH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 147/KPTA.W6-A/PW1.1.2/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

Pelindung/Penasihat : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Ketua Tim : Drs. Nandang Nurdin, M.H.
Wakil Ketua : Dr. Dra. Isti'anah, M.H.
Koordinator : Ahmad Syahab, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Supli, S.H., M.Si.

No.	Satuan Kerja	Nama	Bidang Monitoring dan Evaluasi
1	Palembang, Martapura	1. Drs. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. 2. Sopendi, S.H. 3. Dra. Sundari 4. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I. 5. Rafiah Laili, S.H. 6. Lia Marlisa, S.Kom. 7. Pebrian Eko Saputra, S.T., S.H. 8. Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B. 9. Syawalia Dwi Putri, S.Pd. 10. Fery Julianto, S.H. 11. Pipin Adhi Candra	Koordinator Area 1 Hasil Syarat Usul Area 3, Syarat Usul Area 4 Area 5 Area 6 Area 2
2	Baturaja, Prabumulih	1. Drs. Syarkasyi, M.H. 2. Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H. 3. Drs. Suratman Hardi 4. Sukna Dewi, S.H. 5. Jumhery, S.H. 6. Imron Rusadi, S.H. 7. Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H. 8. Zainuri, S.E. 9. Nadilah Tilarah, A.Md.A.B. 10. Suci Lestari, S.H. 11. Winda Audri, A.Md. A.B. 12. Heri Praselia	Koordinator Koordinator Area 1 Area 1 Syarat Usul Hasil Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 2
3	Kayuagung, Pangkalan Balai	1. Dr. Azid Izuddin, M.H. 2. Dra. Isti'anah, M.H. 3. Ledy Faramita, S.E., M.H. 4. Ikhtiar Hidayati, S.H. 5. Aisah, S.H. 6. Desty Marinda Sari, S.E. 7. Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom. 8. Berlau Jaken, S.E., M.Acc., Akt. 9. Annisa Dwita Aurum, S.T. 10. Poppy Lestari, A.Md.Kom. 11. Muhammad Arif, S.H.	Koordinator Koordinator Syarat Usul Area 1 Hasil Area 3 Area 2 Area 4 Area 5 Area 6
4	Lubuklinggau, Muaradua	1. Drs. Nandang Nurdin, M.H. 2. Drs. Azkar, S.H. 3. Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H. 4. Drs. Taptazani, S.H. 5. Alhamidi, S.H. 6. Kodri, S.H.I. 7. Muslimawati, S.E. 8. Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M. 9. Niken Martika Sari, S.Kom., M.H. 10. Tenti Sulastri, S.M.	Koordinator Koordinator Syarat Usul Area 2 Area 2 Area 1 Hasil Area 3 Area 4 Area 5

		11. Ratna Dewi, S.E. 12. Purnama Irawan	Area 6
5	Muara Enim, Pagar Alam	1. Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I. 2. Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H. 3. Dra. Faroja, S.H., M.H. 4. Edy Syafiq, S.H. 5. Rani Mayazuruna, S.H. 6. Arpita Pitriyanti, S.H. 7. Apriyati, S.H. 8. Ilham Awaludin, S.Kom. 9. Cean Feby Validia, S.H. 10. Putri Dian Ambarsari, A.Md. 11. Rendi Ali Purnomo, S.T.	Koordinator Area 4 Syarat Usul Hasil Area 5 Area 3 Area 2 Area 6 Area 1
6	Lahat, Sekayu	1. Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. 2. Drs. Nasrul, M.A. 3. Azuardi Rizal, S.SI., M.M. 4. Dra. Rosmaladaya 5. Dra. Rodiyati 6. Fara Umitha, S.H. 7. Dra. Amila Roza 8. Marida, S.Ag. 9. Diar Estiwinengku, S.Kom., M.M. 10. Thoriq Azziad, S.T. 11. Muhammad Yusron Hartoyo, A.Md.Kom. 12. Muhammad Fuad	Koordinator Koordinator Syarat Usul Hasil Area 5 Area 6 Area 6 Area 2 Area 2 Area 4 Area 3 Area 1

Ketua,



ABDULLAH